

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 2.1 Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

##### 2.1.1 Sejarah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang yang unik dan menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Sejarah panjang DIY tidak lepas dari eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1775 dan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813. Dinamika perjalanan historis wilayah nusantara terus berlangsung diselingi pergantian kekuasaan, namun Kedaulatan Kasultanan dan Kadipaten tetap diakui baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY menegaskan kembali keistimewaan DIY tersebut. Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-bhinneka tunggal ika-an*, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

### **2.1.2 Dasar Filosofi Pembangunan**

Pembangunan di DIY dilandasi oleh filosofi adiluhung yang juga menjadi panutan bagi kehidupan masyarakat yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*. *Hamemayu Hayuning Bawana* menjelaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang berdimensi berkelanjutan. Esensi nilai budaya merupakan hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini sebagai sesuatu yang azali, berlaku umum, dipedomani, dan memiliki nilai manfaat.

### **2.1.3 Visi**

Visi Pembangunan Jangka Panjang DIY ialah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. (RPJPD, 2005-2025)

### **2.1.4 Misi**

Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;

- c) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d) Mewujudkan sosio-kultural & sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan & teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. (RPJMD, 2012-2017).

### **2.1.5 Tujuan**

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- 1) Misi Membangun Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan, bertujuan :
  - a) Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
  - b) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
  - c) Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup.
- 2) Misi Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Didukung Dengan Semangat Kerakyatan, Inovatif, dan Kreatif, bertujuan :
  - a) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
  - b) Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
- 3) Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bertujuan :
  - a) Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif .
- 4) Misi Memantapkan Prasarana dan Sarana Daerah, bertujuan :
  - a) Mewujudkan pelayanan publik;
  - b) Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang (RPJMD, 2012-2017).

## **2.2 Karakteristik Wilayah**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Luas wilayah administrasi DIY sebesar 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17 persen dari luas daratan Indonesia.

Secara administratif, DIY menjadi wilayah otonom yang memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang kedudukan hukum DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Wilayah administrasi DIY terbagi menjadi 5 kabupaten/kota, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Kelima kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pusat penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat provinsi berada di Kota Yogyakarta. (BPS DIY, 2016).

## **2.3 Karakteristik Penduduk**

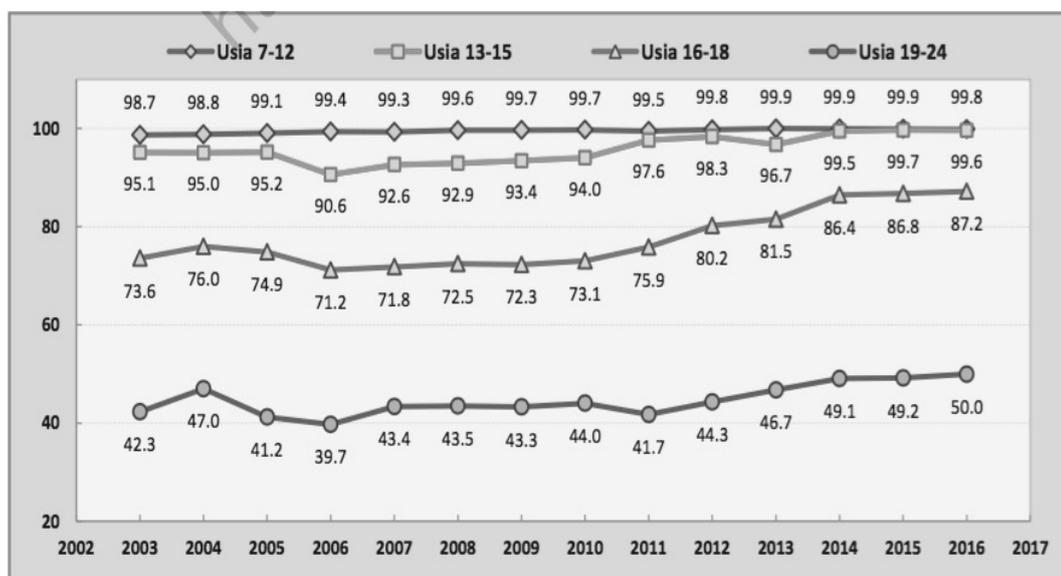
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, populasi penduduk DIY tercatat mencapai 3.457.491 jiwa. Komposisinya adalah 49,4 persen laki-laki dan 50,6 persen perempuan atau perempuan lebih dominan. Populasi penduduk DIY semakin bertambah setiap tahun dengan laju pertumbuhan berkecukupan. Hasil Sensus Penduduk tahun 1971 mencatat jumlah penduduk DIY sebanyak 2,5 juta

jiwa dan meningkat menjadi 3,5 juta jiwa di tahun 2010. Jumlah penduduk ini diproyeksikan akan bertambah menjadi 3,9 juta di tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020 (BPS DIY, 2017).

## 2.4 Karakteristik Pendidikan

APS penduduk DIY pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun selama periode 2002-2017 sudah mendekati 100 persen. Artinya, hampir semua penduduk berusia 7-15 tahun sudah mendapatkan kesempatan bersekolah pada berbagai jenjang. Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sudah cukup berhasil di DIY. APS penduduk berusia 16-18 tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dan berada pada level 87,2 persen pada tahun 2016. APS penduduk berusia 19-24 tahun juga semakin meningkat secara bertahap dan tercatat pada level 50 persen (BPS DIY, 2017).

**Grafik 2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah di DIY, 2003-2016 (Persen)**



Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Selanjutnya perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk DIY selama periode 2010-2016 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, AMH DIY mencapai 90,8 persen dan meningkat secara bertahap menjadi 94,6 persen di tahun 2016. Artinya, masih ada 5,4 persen penduduk yang berstatus buta huruf (tidak memiliki kemampuan baca tulis). Dibandingkan dengan angka nasional, AMH penduduk DIY tercatat lebih rendah lebih rendah. Berdasarkan kelompok usia, terlihat cukup jelas penyebab tingginya AMH di DIY adalah andil AMH pada kelompok penduduk berusia tua (>45 tahun). Sementara, AMH penduduk usia 15-44 tahun di DIY sudah lebih tinggi dari level nasional (BPS DIY, 2017).

**Tabel 2.1 Angka Melek Huruf DIY dan Nasional menurut Kelompok Usia, 2010-2016 (Persen)**

Kelompok Umur/ Wilayah		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15+	DIY	90.84	91.04	92.00	92.82	94.44	94.50	94.59
	Indonesia	92.91	92.44	92.97	93.92	95.12	95.22	95.38
15-44	DIY	99.38	99.37	99.66	99.80	99.91	99.81	99.87
	Indonesia	98.29	97.69	97.97	98.39	98.76	98.90	99.00
45+	DIY	78.05	78.94	80.83	82.47	86.29	87.20	87.37
	Indonesia	81.75	81.85	82.83	84.85	87.75	88.11	88.53

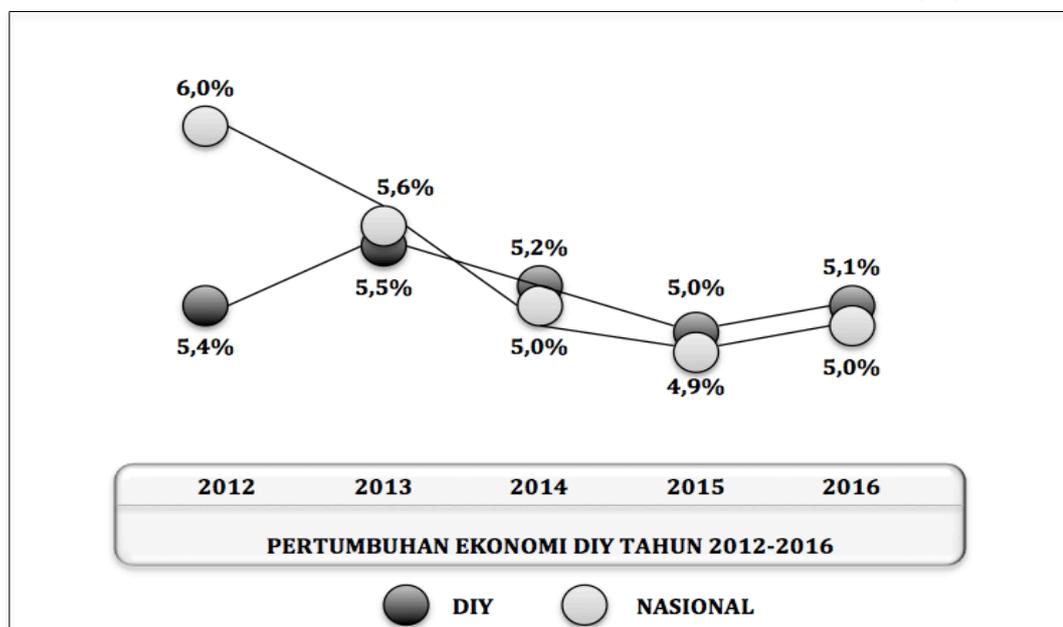
Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kualitas modal manusia juga bisa dilihat dari indikator RLS yang merepresentasikan rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif. Sampai tahun 2009, RLS dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas dan mulai tahun 2010 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pendekatan baru menghasilkan RLS yang lebih rendah, tetapi lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya (BPS DIY, 2017).

## 2.5 Karakteristik Perekonomian

Tahun 2012-2016, perekonomian DIY senantiasa tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,21%. Meskipun sempat mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2013-2015. Fluktuasi perekonomian DIY tidak lepas dari pengaruh siklus perekonomian nasional (BPS DIY, 2017).

**Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2016 (%)**



Sumber : Diolah dari BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

**Tabel 2.2 Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY  
Tahun 2012-2016 (%)**

<b>No.</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,70	10,41
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,57	0,54
3.	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,05	13,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	1,10	0,10	0,09	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6.	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,37	9,34
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,23	8,48
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10.	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12.	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,05	7,09
13.	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,23	8,37
15.	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16.	Jasa Kesehatan	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17.	Jasa Lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100	100

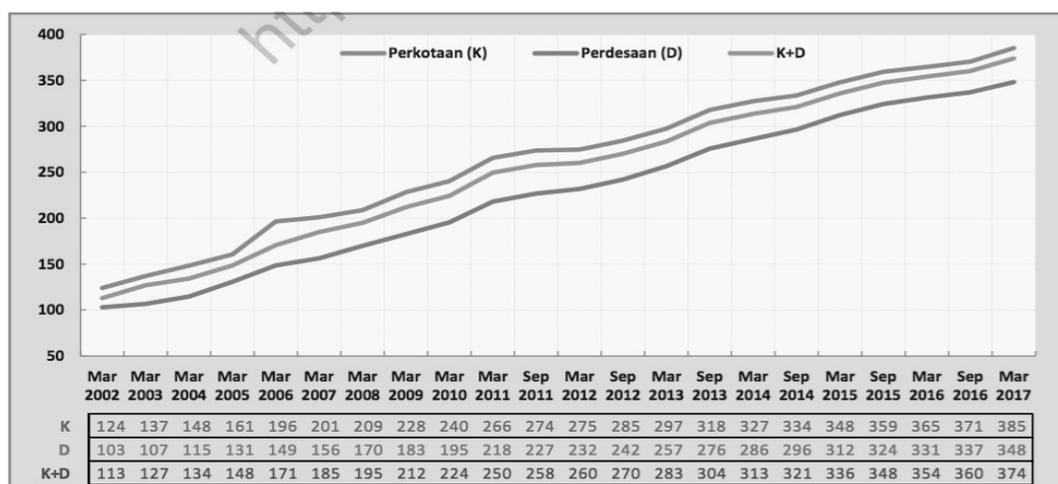
Sumber : Diolah dari BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Industri Pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB DIY, selanjutnya Sektor Pertanian merupakan sektor terbesar kedua PDRB DIY dan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk DIY. Sektor ini mencakup tanaman pangan, kelautan dan perikanan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

## 2.6 Karakteristik Kemiskinan dan Ketimpangan DIY

Garis kemiskinan DIY selama periode 2002-2017 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga (inflasi). Pada kondisi Maret 2002, nilai nominal garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp113,- ribu perkapita sebulan. Angka ini meningkat secara bertahap menjadi Rp374,- ribu di bulan Maret 2017 (BPS DIY, 2017).

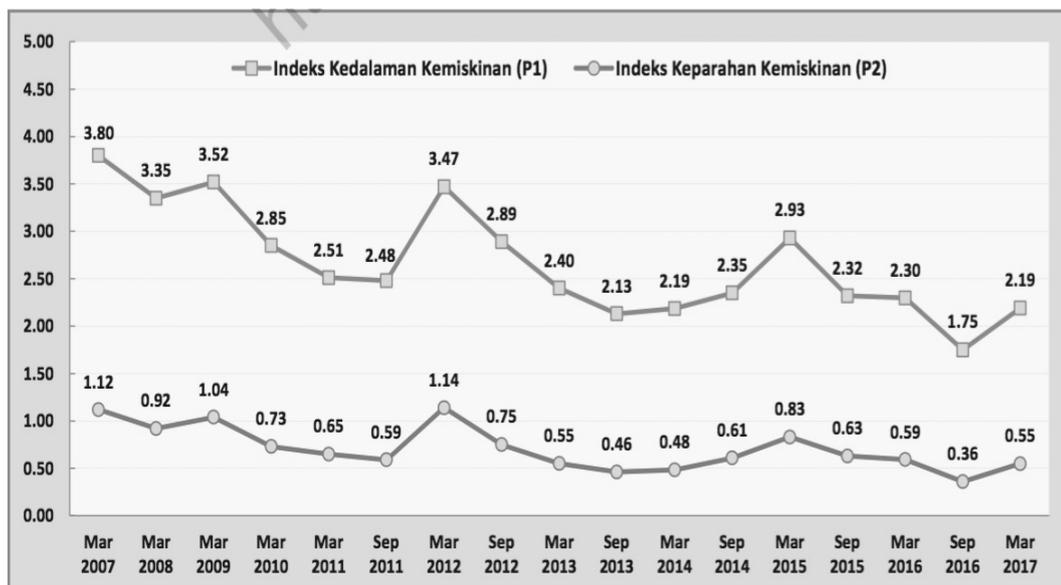
**Grafik 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2002-2017 (000 Rp)**



Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count-HC*) DIY selama periode 2000-2017 menunjukkan pola yang semakin menurun, meskipun cukup ber uktuasi. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 1.035,8 ribu jiwa dengan persentase (*Head Count Index-HCI*) sebesar 33,39 persen. Tingginya level kemiskinan pada saat itu masih dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi 1997/1998 yang belum sepenuhnya pulih. Secara bertahap, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai 488,5 ribu jiwa atau 13,0 persen di bulan Maret 2017 (BPS DIY, 2017).

**Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2007-2017**



Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Kemudian terkait sebaran penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DIY, Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakterataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk

miskin (HC) maupun persentasenya (HCI) yang sangat bervariasi antarwilayah. Populasi penduduk miskin terbesar pada tahun 2016 terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat sebanyak 142,8 ribu dan 139,2 ribu jiwa. Sementara, populasi penduduk miskin terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 32,1 ribu jiwa (BPS DIY, 2017).

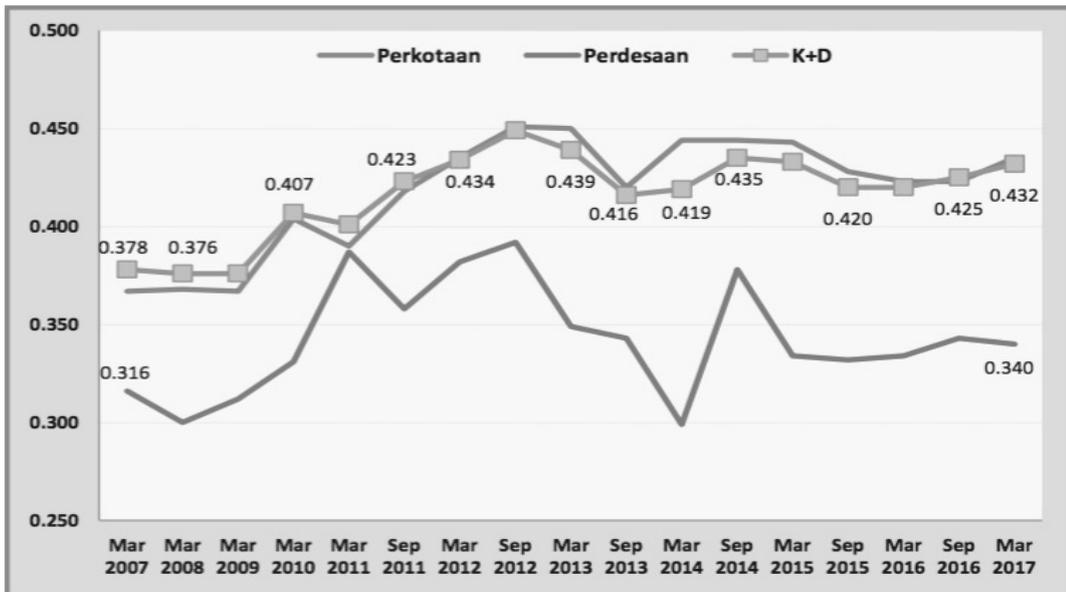
**Tabel 2.3 Perkembangan Indikator Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2015**

Kabupaten/ Kota	2014					2015					2016				
	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kulon Progo	265 575	84.67	20.64	3.22	0.69	273 436	88.13	21.40	4.16	1.24	297 353	84.34	20.30	3.55	1.00
Bantul	301 986	153.49	15.89	2.44	0.59	312 514	160.15	16.33	3.16	0.89	332 057	142.76	14.55	2.02	0.41
Gunungkidul	243 847	148.39	20.83	3.74	1.03	250 630	155.00	21.73	4.55	1.33	264 637	139.15	19.34	4.16	1.30
Sleman	306 961	110.44	9.50	1.15	0.22	318 312	110.96	9.46	1.46	0.37	334 406	96.63	8.21	1.36	0.34
Yogyakarta	366 520	35.60	8.67	1.14	0.26	383 966	35.98	8.75	1.06	0.23	401 193	32.06	7.70	1.05	0.19
<b>DIY</b>	<b>321 056</b>	<b>532.59</b>	<b>14.55</b>	<b>2.35</b>	<b>0.61</b>	<b>335 886</b>	<b>550.23</b>	<b>14.91</b>	<b>2.93</b>	<b>0.83</b>	<b>354 084</b>	<b>494.94</b>	<b>13.34</b>	<b>2.30</b>	<b>0.59</b>

Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Fenomena ketimpangan juga diperjelas oleh nilai indeks Gini DIY pada bulan Maret 2017 yang mencapai 0,432. Perkembangan indeks Gini selama periode 2007-2017 terlihat berfluktuasi dan ada kecenderungan semakin meningkat. Peningkatan indeks ini menggambarkan distribusi pendapatan antar penduduk yang semakin tidak merata. Dibandingkan dengan level nasional, nilai indeks Gini DIY terlihat lebih tinggi atau distribusi pendapatannya lebih timpang (BPS DIY, 2017).

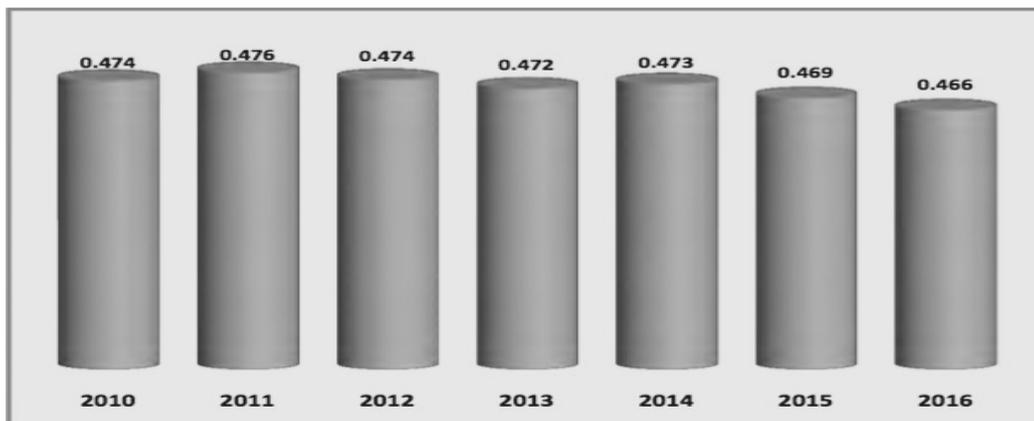
**Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2007-2017**



Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Selain isu ketimpangan pendapatan antar penduduk, ketimpangan pendapatan antar wilayah (ketimpangan regional) juga menjadi persoalan yang cukup krusial di DIY. Salah satu pendekatan metode untuk mengukur ketimpangan regional adalah indeks Williamson.

**Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) DIY, 2010-2016 (Persen)**



Sumber : BPS DIY, Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.

Nilai Indeks meningkat sampai level tertinggi sebesar 0,476 di tahun 2011. Artinya, ketimpangan pendapatan regional semakin meningkat hingga tahun 2011. Namun, mulai tahun 2012 hingga 2016 nilai indeks Williamson tercatat mulai menurun hingga ke level 0,466. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo dan Gunungkidul yang lebih cepat akibat maraknya kegiatan investasi mendorong turunnya level indeks Williamson di DIY (BPS DIY, 2017).